

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Saidi M. Djafar, Eka Merdekawati, *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Sarman, Mohammad T. Makarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.

Halim, Halim, Evi Maria, *Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara & Daerah*, Yogyakarta: Unit Percetakan dan Percetakan STIM YKPN, 2020.

Prawiraamidjaja, Rahman, *Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal*, Bandung: Penerbit Alumni, 1980.

Sutedi, Andrian, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Banga, Wempy, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah : Konsep, Teori dan Penomena di Era Otonomi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Huda, Ni'matul, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

Sudrajat, Tedi, *Hukum Birokrasi Pemerintah : Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Ma'ruf, Umar, *Politik Hukum Otonomi Daerah & Pemilihan Kepala Daerah*, Semarang: Unissula Press, 2010.

Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : PT Gramedia, 2014.

Jurnal

Mudhofar, K & Afrizal, T. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17 No.2, Juli (2016): 176-185.

- Tri, H & Alavi, A. "Pendekatan Keadilan Dalam Membangun Institusi Publik Yang Legitim", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 31, (2021): 721-742.
- Korry, INS. "Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras", *Jurnal Warmadewa*, Vol. 12 No.1, (2018): 76-79.
- Indah. "Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Trunojoyo*, Vol. 9 No.2, (2014): 137-153.
- Rivelino, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Pengantar Keuangan Negara Dan Daerah", *Jurnal Inspirasi*, Vol.8 No.1 (2017): 1-11.
- Wirazilmustaan, Rahmat Robuwan, Rio Armada. "Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.XII No.2, (2018): 2134-2144.
- Imam, Rompii. "Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah", *Jurnal Maksigama*, (2015): 39-59.
- Efie, Baadilla. Dyah, Ridhul, Airin, Daties. "Legalitas Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Sasi*, (2021): 206-220.
- Nunung Munawaroh. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance Di bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis)", *Jurnal Media Birokrasi*, Vol.1, No.2, (2019):146-150.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.

Internet

Artaya, “Revisi UU Nomor 33/2004 Wujud Keadilan dan Keselarasan”, *Atnews*, April 4, 2021, <https://atnews.id>

Joko T. Harryanto, “Desentralisasi Fiskal Seutuhnya”, *Kemenkeu*, Agustus 31, 2015, <https://scholar.google.co.id>

“Golkar Bali Dorong Revisi UU No. 33 Tahun 2004”, *Jawapos*, September 23, 2021, <https://radarbali.jawapos.com>

“Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, *Maritim*, Januari 18, 2022, <https://jdih.maritim.go.id>